









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	: SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Stabdar Operasional dan Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik</li> <li>2. Memahami tentang pelayanan informasi publik</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelayanan Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Sengketa Informasi Publik</li> <li>2. <i>Softcopy</i> permohonan dan keberatan informasi publik</li> <li>3. Perangkat keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoin, dan Stempel</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN / PENDATAAN :</b>	
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi Pusat. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Penanganan Sengketa Publik pada PPID Komisi Informasi Pusat tidak berjalan.	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari komisi informasi / pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi		 		Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi / pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah / Berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	